

**LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KANTOR
CAMAT KELAPA
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KELAPA, DESEMBER TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.
BAB II	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	a. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda
	3.1 Pendapatan
	3.2 Beban
	3.3 Belanja
	3.4 Aset
	3.5 Kewajiban
	3.6 Ekuitas Dana
	b. Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, tuntut entitas akuntansi/entitas pelaporan menggunakan basis akrual Pemda
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemda
BAB V	Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Tujuan Kebijakan dan Catatan atas Laporan Keuangan

Pada tahun anggaran 2019 kebijakan keuangan yang ditetapkan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa dititikberatkan pada Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur serta Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Semua program yang dilaksanakan diarahkan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta di dalam upaya peningkatan kinerja aparatur pada Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa.

Kebijakan ini mempunyai pengaruh pada Neraca maupun Arus Kas pada Realisasi Anggaran Tahun 2019. Dimana pada Neraca, kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana kerja dengan sendirinya akan menambah aset yang di miliki oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa.

2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Secara umum Pencapaian Target Kinerja APBD pada Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa dapat dikatakan cukup baik. Sebagian besar program kegiatan pada Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa dapat terlaksana dengan lancar dan berjalan tepat waktu sesuai dengan apa yang telah diprogramkan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut dapat diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi yang dicapai serta tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong serta tingkat SDM yang cukup termasuk mental, pengawasan intern dan ekstern yang cukup baik serta didukung dengan perencanaan yang matang.

Faktor yang menghambat dikarenakan kurangnya SDM yang memadai bagi personil yang melaksanakan kegiatan, sehingga hal tersebut menyebabkan beberapa kegiatan terjadi pergeseran jadwal pelaksanaan.

3. Ruang Lingkup dan Isi

Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa merupakan entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Dimana Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa bertanggungjawab terhadap anggaran yang ada termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Adapun realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam bentuk Laporan

Realisasi Anggaran yang harus disampaikan/dilaporkan kepada fungsi Bendahara Umum Daerah / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (BUD/PPKD) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Sebagai Entitas Akuntansi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa menyajikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa yang terdiri atas *Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)* sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan untuk memberikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas akuntansi dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk digunakan didalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

3.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam laporan keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Catatan Atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Untuk asas akuntabilitas dan transparansi, APBD yang disusun dan dijalankan tersebut harus ada suatu laporan mengenai APBD tersebut. Sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan maka perlu disusun suatu laporan dari hasil pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang semuanya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan satuan kerja dan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, khususnya selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan penyusunan laporan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sebagai bentuk pertanggungjawaban ataupun akuntabilitas.

Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat adalah untuk memberikan gambaran mengenai beberapa hal, antara lain :

1. Realisasi sasaran yang diharapkan menurut fungsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Realisasi pendapatan yang digunakan untuk membiayai belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
3. Realisasi belanja dalam satu periode yang telah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari Laporan Realisasi Keuangan dan Neraca.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Kecamatan Kelapa tidak ada Rp. 0

2.1.2 Beban

Beban disajikan pada Laporan Operasional dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| a) Beban Pegawai sebesar | : Rp. 2.593.394.133,00,- |
| b) Beban Persediaan sebesar | : Rp. 289.580.550,00,- |
| c) Beban Jasa sebesar | : Rp. 1.425.814.825,00,- |
| d) Beban Pemeliharaan | : Rp. 71.699.000,00,- |
| e) Beban Perjalanan Dinas | : Rp. 265.704.139,00,- |
| f) Beban Penyusutan dan Amortisasi | : Rp. 0,- |
| g) Beban Penyusutan Aset Tetap | : Rp. 129.077.200,00, |

1. Beban Persediaan

Di Beban Persediaan ada selisih dengan pengurus barang di karenakan salah Penempatan Kode Rekening dalam Penganggaran RKA atau di DPA nya.

Dengan rincian sebagai Berikut :

- Alat Tulis Kantor selisih sebesar Rp. 1.506.200,-
- Alat kebersihan Kantor selisih sebesar Rp . 1.010.000,-
- Meterai selisih sebesar Rp. 477.00,-
- Alat – Alat cetak selisih Sebesar Rp. 1.415.000,-

2.1.3 Belanja.

1. Belanja Operasi

Sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan Anggaran tahun 2019, Anggaran Belanja Perangkat Daerah Kecamatan kelapa ditetapkan sebesar **Rp. 6.471.744.850,00,-** (*Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).- Sampai dengan Akhir semester tahun 2019 dapat terealisasi sebesar **Rp. 6.181.383.647-** (*Enam Milyar Seratus Juta Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh rupiah*) .-

Adapun rincian belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Perubahan tahun 2019, anggaran belanja pegawai OPD Kecamatan Kelapa ditetapkan sebesar **Rp. 2.697.750.000,00 .-** (*Dua milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).- dan terealisasi sebesar **Rp. 2.593.394.133.00.-** (*Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) .

b. Belanja Barang dan Jasa

Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Perubahan tahun 2019, anggaran belanja barang dan jasa Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa ditetapkan sebesar **Rp. 3.773.994.850,00.-** (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) .- dan terealisasi sebesar **Rp. 3.587.989.514,00.-** (*Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*) .-

c. Belanja Hibah

Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Perubahan tahun 2019, anggaran belanja hibah SKPD Kecamatan Kelapa ditetapkan sebesar **Rp. 70.241.000,00.-** (*Tujuh Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) .- dan terealisasi sebesar **Rp. 70.241.000,00.-** (*Tujuh Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) .-

d. Belanja Modal

Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Perubahan tahun 2019, anggaran belanja modal OPD Kecamatan Kelapa ditetapkan sebesar **Rp. 1.571.000,00.-** (*Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar **Rp. 1.535.207.000,00.-** (*Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

a. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat sebagai salah satu organisasi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan di Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat;
- c. Seksi Pemberdayaan Pemerintah Desa;
- d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- e. Seksi Tata Pemerintahan;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- h. Subbag Bagian Umum dan Perlengkapan;
- i. Subbag Penyusunan Program dan Keuangan;
- j. Lurah Kelapa

Masing-masing seksi dalam SKPD Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat merupakan entitas akuntansi dimana masing-masing seksi bertanggung jawab terhadap anggaran yang ada dalam DPA-SKPD tersebut termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Adapun realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan ataupun disampaikan kepada fungsi Bendahara Umum Daerah dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Bangka Barat dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Sebagai entitas Akuntansi PPK-SKPD Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat menyajikan Laporan Keuangan Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas, Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.

(4) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

(5) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

(6) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Laporan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2019, dengan besarnya Anggaran belanja Sebesar **Rp. 5.595.994.850,00,-** dan Belum ada Perubahan anggaran.

Laporan keuangan Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun secara sentralisasi oleh PPK-SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan seperti aset, kewajiban dan ekuitas dana, dinilai sesuai nilai perolehan historis, yaitu aset dicatat/ diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/ diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan pada buku inventaris bidang aset yang merupakan rekap dari daftar inventaris SKPD. Harga perolehan tersebut memasukkan biaya-biaya lain dalam perolehan dimaksud semisal honorarium dan ATK.

- c. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyusun Peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan mulai berlaku 1 Januari 2010. Untuk menerapkan peraturan Bupati tersebut, maka pada neraca per 28 Juni 2019 dilakukan pemisahan aset dengan nilai perolehan di bawah kapitalisasi, yaitu yang kurang dari Rp 500.000,00 untuk kriteria peralatan dan mesin, Rp 10.000.000,00 untuk kriteria gedung & bangunan, Rp 5.000.000,00 untuk kriteria instalasi & jaringan, Rp 100.000,00. Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, untuk seluruh aset dibawah kapitalisasi tidak dimasukkan dalam neraca namun dijelaskan di catatan atas laporan keuangan.

Secara umum pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menerapkan penyusutan. Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan, secara umum telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan yang disusun Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.1 Penjelasan Neraca

3.1.1 Aset

Nilai aset per 31 Desember 2019 adalah Rp. 2.554.949.573.00,-
terdiri atas :

a. Aset Lancar

Nilai aset lancar kantor camat per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.021.600.00.-

a. Dengan Rincian Persediaan Daftar Terlampir

Perbandingan persediaan Tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat dibawah ini :

Jenis Persediaan	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
Persediaan Bahan Habis Pakai	725.000,00,-	741.000,00,-
<i>Jumlah</i>	725.000,00,-	741.000,00,-

b. Aset Lancar Di Kas lainnya

Berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 296.600.00,-

c. Aset Tetap

Nilai aset tetap yang tercantum dalam neraca per 31 Desember 2018 merupakan penambahan aset per 31 Desember 2019, ditambah aset yang timbul dari belanja modal pada APBD Tahun 2019.

Aset tetap pada neraca Kantor Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat ini merupakan kompilasi dari aset tetap yang terdiri dari :

	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
Tanah	16.283.998,00,-	16.283.994,00,-
Peralatan dan Mesin	1.567.504.650,00,-	1.083.104.650,00,-
Gedung dan Bangunan	2.741.876.667,00,-	2.033.666.200,00,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	171.776.532,00,-	22.600.000,00,-
Aset Tetap Lainnya	740.000,00,-	740.000,00,-
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00,-	0,00,-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.945.637.991,00,-	1.816.560.791,00,-
Jumlah Aset Tetap	2.552.543.856,00,-	1.339.834.053,00,-

Dengan Keterangan sebagai berikut :

a. Tanah

Aset Tetap Tanah di Perangkat Daerah OPD Kecamatan kelapa bernilai Rp. 16.283.998,- ada penambahan di Aset tanah di tahun 2019, dengan nilai Rp 4,- , tanah tersebut di dapat kan dari tanah Hibah Masyarakat jadi Aset Tanah di tahun 2019 sebesar Rp. 16.283.998,00,-

b. Peralatan dan Mesin

Didalam Aset Peralatan dan Mesin ada Perubahan tahun 2019 dengan nilai tahun 2018 Rp. 1.083.104.650,00,- dan tahun 2019 Rp 1.567.504.650,00,- di karenakan ada nya penambahan belanja modal sebesar Rp. 484.400.000,00,-.

c. Gedung dan Bangunan

Di dalam Aset gedung dan Bangunan ada Penambahan, di tahun 2018 Sebesar Rp. 2.033.666.200,00, dan di tahun 2019 sebesar Rp. 2.741.876.667,00,- dengan Penambahan sebesar Rp. 702.210.467,00,- dan di tambah ada Pembulatan 1

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Adanya pertambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di tahun 2018 sebesar Rp. 22.600.000,00. Dan di tahun 2019 sebesar Rp. 171.776.532,00,-

e. Aset Tetap Lainnya

Tidak ada pertambahan atau berkurangnya aset tetap lainnya di tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp. 740.000,00.

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Tidak ada

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Niai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Audited tahun 2018 Rp. 1.816.560.791,00,- dan tahun 2019 ada Perubahan dengan jumlah Rp. 1.945.637.991,00,-

h. Aset Dibawah Kapitalisasi

Pada Neraca per 31 Desember 2019 tercatat Aset di bawah Kapitalisasi sebesar Rp. 193.420.000. berupa Pengadaan teralis dan pengadaan Tong Sampah

Penambahan nilai aset tetap tahun 2018 merupakan akumulasi penambahan nilai aset tetap karena adanya pengadaan di tahun 2019.

d. Di Neraca Kas lainnya

Nilai Kas Lainnya berupa Piutang Pajak yang Belum di Bayar di tahun 2019 dan baru di bayar di tahun 2020 sebesar Rp. 296.000.

3.1.2 Kewajiban

a) Kewajiban Jangka Pendek

Pada tahun 2019 tidak terdapat Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp. 296.000.00,-**

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 2.554.949.573.00,-

C. Ekuitas

Ekuitas Awal per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 1.341.959.170,00,-** dan Ekuitas Awal tahun Per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 2.554.652.973,00,-**

3.2 Penjelasan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Kantor Kecamatan Kelapa Tahun 2019 disandingkan dengan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018 sudah ada nilainya dikarenakan Laporan Keuangan Tahun 2018 Kabupaten Bangka Barat sudah menggunakan metode accrual basic.

Berikut hal-hal yang yang dapat dijelaskan untuk Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Kelapa :

1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Per 31 Desember tahun 2019 sebesar **Rp. 2.554.652.973,00,-** adalah nilai ekuitas yang diambil dari nilai Ekuitas pada Neraca Audited tahun 2018 sebesar Rp. **1.341.959.170,00,-**

2. Surplus / (defisit) – LO

Nilai Pada Laporan Operasional (LO) Kantor Kecamatan Kelapa 2018 sebesar Rp. **4.206.027.061,00,-** dan Per 31 Desember 2019 sebesar **Rp 4.775.269.847,00,-**

- Hasil Jumlah di Surplus / (deficit) - LO di dapat dari Beban persediaan sebesar dengan Rincian Sebagai Berikut :

- a. Beban Pegawai sebesar Rp. 2.593.394.133,00,-
- b. Beban Persediaan sebesar Rp. 289.580.550,00,-
- c. Beban Jasa sebesar Rp. 1.425.814.825,00,-
- d. Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 71.669.000,00,-
- e. Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 265.704.139,00,-

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

- f. Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp. 296.600,00,-
- g. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 0,00
- h. Penyesuaian Aset Dibawah Kapitalisasi sebesar Rp. 271.689.425,00,-
- i. Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0,00
- j. Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp. 0,
- k. Koreksi ekuitas Kewajiban Akhir tahun 2019 sebesar Rp. 2.554.949.573,00,- dan jumlah Kewajiban tahun 2018 sebesar Rp. 1.341.959.170,00,- tidak ada penghapusan Aset Rusak berat pada Peralatan dan mesin, tidak ada penghapusan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp. 1.945.637.991.00,- ada perubahan Rp dan Aset di bawah Kapitalisasi tahun 2019 sebesar Rp. 193.420.000,-
- l. Kewajiban yang harus dikonsolidasikan sebesar Rp. **6.181.383.647,00,-** merupakan hasil akhir dari surplus deficit dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
- m. Ekuitas Akhir pada LPE sebesar Rp. 2.554.652.973.00,- harus sama dengan jumlah ekuitas pada laporan Neraca.

3.3 Penjelasan pada Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional Kecamatan Kelapa Tahun 2019 disandingkan dengan Laporan Operasional Tahun 2018.

- i. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi daerah pada Kantor Camat Kelapa tahun 2018 sebesar Rp. 00,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp 00,-.

ii. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Kantor Camat Kelapa Per 31 Desember tahun 2018 sebesar Rp. **2.593.394.133,00,-** dan pada tahun 2018 sebesar **Rp 2.302.865.704,00,-**

iii. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada kantor camat kelapa Per 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp. **289.580.550,00,-** dan pada tahun 2018 sebesar Rp. **91.328.000,00,-** sumber nilai Beban Persediaan tahun 2019 bukan hanya di dapat nilai dari Beban Persediaan tetapi didapatkan juga dari rincian sbb :

1. Penambahan nilai Dibeban Persediaan di Karenakan ada selisih Persediaan PPK dengan Pengurus Barang sebesar RP.4.408.200,00,-

iv. Beban Jasa

Beban Jasa pada kantor camat kelapa Per 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp. **1.425.814.825,00,-** dan pada tahun 2018 sebesar Rp. **1.317.687.801,00,-**

v. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada kantor camat kelapa Per 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp. **71.699.000,00,-** dan pada tahun 2018 sebesar Rp **132.430.100,-**

Beban Perjalanan Dinas

vi. Beban Perjalanan Dinas pada kantor camat kelapa Per 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp. **265.704.139,00,-** dan pada tahun 2018 sebesar Rp. **259.915.000,00,-**

vii. Beban Penyusutan aset

Beban Penyusutan aset pada kantor camat kelapa Per 31 Desember tahun 2019 Sebesar Rp. 0,00'- dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 101.800.456,00,-.

viii. Surplus/(defisit) LO

Surplus/Defisit LO tahun 2019 sebesar Rp. **4.646.192.647,00,-** sedangkan tahun 2018 sebesar Rp. **4.206.027.061,00,-**

3.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1) Belanja Operasi

Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
- Belanja Pegawai	2.697.750.000,00,-	2.593.394.133,00,-	96,13%
- Belanja Barang	3.773.994.850,00,-	3.587.989.514,00,-	95,07%
- Bunga	0,00	0,00	-
- Subsidi	0,00	0,00	-
- Hibah	0,00	0,00	-
- Bantuan Sosial	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi	6.471.744.850,00	6.181.383.647,00	95,51%

Pada tahun anggaran 2019, Kecamatan Kelapa tidak ada mengelola dana dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2) Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KET
1	Kendaraan Roda Empat Dump Truk	1 Unit	Rp. 425,200.000	Rp.425,200.000	
2	Printer	2 Unit	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	
3	Personal Computer (PC)	2 Unit	Rp. 7500.000	Rp. 7500.000	
4	Tralis 2 Pintu	6 Unit	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000	
5	Tralis Jendela	1 Unit	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
6	Ginset	1 Unit	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	
7	Sound System	1 Unit	Rp. 16.450.000	Rp. 16.450.000	
8	Tong Sampah	985 Buah	Rp. 194,538	Rp. 191.620.000	
9	Infocus	1 Unit	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000	
10	Kamera	1 Unit	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
11	Tempat Parkir Motor	1 Unit	Rp 30.000.000	Rp. 30.000.000	
12	Pembangunan Paud Kamboja	1 Unit	Rp. 175.232.110	Rp. 175.232.110	
13	Gedung TK Paud Satu Hati	1 Unit	Rp. 175.232.110	Rp. 175.232.110	

14	Posyandu Melati	1 Unit	Rp. 106.580.889	Rp. 106.580.889	
15	Pos Bindu	1 Unit	Rp. 221.165.358	Rp. 221.165.358	
16	Jalan Stapak	1	Rp. 149.176.532	Rp. 149.176.532	

BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) disajikan bersamaan dengan laporan keuangan lainnya yaitu Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasioal dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga merupakan satu kesatuan yang komprehensif. Laporan keuangan disajikan sedemikian rupa agar dapat dipahami secara jelas dan mudah oleh para pengguna laporan keuangan yang tidak terbatas hanya untuk manajemen entitas pelaporan ataupun kalangan pembaca tertentu, namun juga oleh masyarakat publik.

Lebih lanjut, penyajian CALK ini diharapkan dapat lebih memberikan penjelasan yang akurat atas laporan keuangan Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab.

Demikian gambaran singkat mengenai laporan keuangan Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2019. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat .

Kecamatan Kelapa, Desember
2019

KEPALA SKPD



SYAMSIAR, S.IP

NIP. 19670619 198903 1 003